

# Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul

## *Financial Ratio Analysis for Performance Appraisal at Gunung Kidul District Government*

Rigel Nurul Fathah<sup>a</sup>

Universitas Aisyiyah Yogyakarta

---

### ARTICLES INFORMATION

#### **E B B A N K**

Vol. 8, No.1, Juni 2017  
Halaman : 33 – 48  
© LP3M STIEBBANK  
ISSN (online) : 2442 - 4439  
ISSN (print) : 2087 - 1406

#### **Keywords :**

*Regional Financial Performance, Effectiveness Ratio PAD, Regional financial Efficiency Ratio, Ratio of Suitability, Growth Ratio and Ratio of Regional Financial Independence.*

#### **JEL classifications :**

H72, H83

#### **Contact Author :**

<sup>a</sup> rigel.nurul@yahoo.com

### ABSTRACT

*The objective of this research is to analyze the financial performance of Gunungkidul regency from 2010 until 2014 seen from : (1) Effectiveness Ratio PAD, (2) Regional Financial Efficiency Ratio, (3) Ratio of Suitability, (4), Ratio of Growth, and (5) Ratio of Independence Regional Finance. This research is quantitative descriptive. This research collecting secondary data at Central Bureau of Statistics (BPS) Yogyakarta. Data analysis techniques used quantitative descriptive formula : Effectiveness Ratio PAD, Regional Financial Efficiency Ratio, Ratio of Suitability, Ratio of Growth and Ratio of Regional Financial Independence. The analysis showed the financial performance of Regency Gunungkidul seen from (1) Ratio Effectiveness of PAD can be considered effective, because the average effectiveness by 131,8% (2) Efficiency Ratio Regional Financial classified as not efficient since the average magnitude of this ratio at 109,8%. (3) Ratio of Suitability can be said that the Gunungkidul regency allocated most of its budget for operating expenditure area which is an average of 71,26% compared with the average capital expenditure amounted to 9,92%. (4) Ratio of Growth Income, Revenue, Operating expenditure always increase from year to year and Growth Capital Expenditure is volatile (5) Ratio of Financial Independence area is still classified as Low once and in the category of relationship patterns Instructive because the average ratio of 10%.*

---

### PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 1999, Pemerintah Daerah di Indonesia memasuki fase baru dalam sistem pemerintahan. Pergantian pemerintahan dari Orde Baru kepada Orde Reformasi yang dimulai pertengahan 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan dan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, mengoptimalkan mutu jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. (Nahmiati 2008)

Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang presentasinya lebih kecil kepada Pemerintah Pusat sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Sesuai dengan UU No 33 tahun 2004 pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (capital investment) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dari Pempus. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah, BUMD dan Lain PAD yang sah.

Dalam kaitannya dengan persoalan yang melingkupi kebijakan otonomi daerah, permasalahan mendasar yang masih belum teratasi sampai saat ini melalui kebijakan otonomi daerah adalah keterbatasan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Masih terjadi ketergantungan yang tinggi terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi beberapa kabupaten Gunung Kidul antara lain : (1) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. (Adhiantoko, 2013).

Berdasarkan kajian latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan dilihat dari : (1) Rasio Efektivitas PAD, (2) Rasio Kekeragaman, (3) Rasio Pertumbuhan (4) Rasio Kekeragaman (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang

terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010).

Kinerja Keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Agustina, 2013)

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori :
  - a) Pendapatan Asli Daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah
  - b) Dana Perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang di alokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya
  - c) Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
  - a) Belanja aparatur daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bahan bangunan gedung dan lain sebagainya.
  - b) Belanja pelayanan publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.

- c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- 3) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi :
- a) Sumber penerimaan daerah, yaitu :
  - b) Sumber pengeluaran daerah
  - c) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
  - d) Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

### **Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$Rasio\ Efektifitas\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2012), adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

### **Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutab pendapatannya tersebut efisien atau tidak. . Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Persentase Efisiensi</b>
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mahsun (2012)

### **Rasio Keserasian**

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90% Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi (2010). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk rasio belanja modal belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah.

### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2007). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

r = Rasio Pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2 . Pola Hubungan dan Tingkat kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Oppier (2013)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## Kerangka Kerja Penelitian

**Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian**



## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gunungkidul 2010-2014.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor BPS yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2010-2014.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah :

1. Rasio Efektivitas PAD
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
3. Rasio Keserasian
4. Rasio Pertumbuhan
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

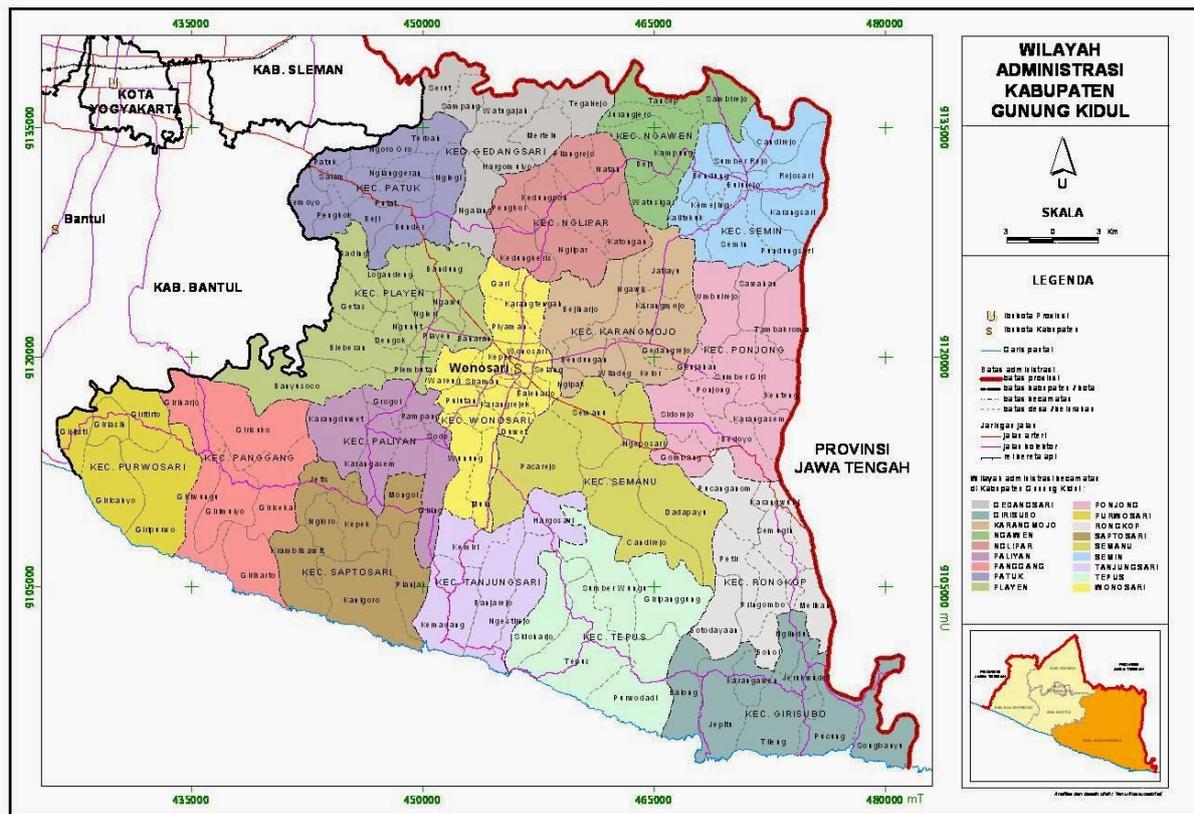
## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Obyek Penelitian**

Secara geografis kabupaten Gunungkidul terletak antara 7°46'-8°09'Lintang Selatan dan 110°21'-110°50' Bujur Timur. Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km<sup>2</sup> atau 46,63% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Wonosari. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Sleman di barat.

Sebagian besar wilayah kabupaten ini berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yakni bagian dari Pegunungan Sewu. Secara administratif wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa.

Gambar 2. Peta Kabupaten Gunung Kidul



## Analisis Data

### 1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (dalam jutaan)	Realisasi PAD (dalam jutaan)	REPAD (%)	Kriteria
2010	39.756.344	42.542.031	107	Efektif
2011	41.835.405	54.462.419	130	Efektif
2012	55.600.362	67.050.782	121	Efektif
2013	66.710.859	83.427.448	125	Efektif
2014	90.333.149	159.304.338	176	Efektif

Sumber Data : BPS (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Gunungkidul rata-rata selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan

perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010 sebesar 107%, tahun 2011 sebesar 130%, tahun 2012 turun 9% menjadi 121%. Di tahun 2013 mengalami kenaikan 4% menjadi 125% dan kemudian di tahun 2014 mengalami kenaikan signifikan menjadi 176%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2010-2014 tergolong efektif karena hasil menunjukkan di atas 100%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Gunungkidul sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus terus mengoptimalkan penerimaan potensi pendapatannya yang sudah telah ada dan mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Pemerintah Daerah diharapkan tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk meningkatkan potensi daerah antara lain mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

## 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan rumus :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 6. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010-2014**

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (dalam jutaan)	Realisasi Pendapatan (dalam jutaan)	REKD%	Kriteria
2010	857.556.526	798.248.875	107	Tidak Efisien
2011	1.057.703.670	965.826.233	110	Tidak Efisien
2012	1.191.890.450	1.076.501.995	111	Tidak Efisien
2013	1.354.198.687	1.242.092.675	109	Tidak Efisien
2014	1.533.508.352	1.372.846.296	112	Tidak Efisien

Sumber : BPS (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan 2013 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar 798.248.875.000 naik menjadi 965.826.233.000 pada tahun 2011. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2012 menjadi 1.076.501.995.000. Dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan lagi pendapatan daerah menjadi 1.242.092.675.000, naik kembali pada tahun 2014 menjadi 1.372.846.296.000. Kenaikan pendapatan daerah disertai dengan kenaikan belanja daerah dari tahun ke

tahun. Total belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 sebesar 857.556.526.000 mengalami kenaikan di tahun 2011 menjadi 1.057.703.670.000, pada tahun 2012 naik menjadi 1.191.890.450.000. Tahun 2013 juga mengalami kenaikan menjadi 1.354.198.687.000 kemudian di tahun 2014 menjadi 1.533.508.352.000.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten 2010 sampai dengan 2014 sebesar 109,8%. atau dapat dikatakan tidak efisien karena melebihi 100%. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk ke depannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga ke depannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

### 3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

**Tabel 7. Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010-2014 (Belanja Operasi)**

Tahun Anggaran	Total Belanja (dalam jutaan)	Realisasi Belanja Operasi (dalam jutaan)	Rasio Belanja Operasi (%)
2010	8.575.565.260	645.496.109	75.27%
2011	1.057.703.670	756.172.120	71.49%
2012	1.191.890.450	847.695.011	71.12%
2013	1.354.198.687	937.133.369	69.20%
2014	1.533.508.352	1.061.567.148	69.22%

Sumber : BPS (diolah)

Sedangkan Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal dapat dilihat di tabel di bawah ini :

**Tabel 8. Penghitungan Rasio Keserasian Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010-2014 (Belanja Modal)**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Total Belanja (dalam jutaan)</b>	<b>Realisasi Belanja Modal (dalam jutaan)</b>	<b>Rasio Belanja Modal (%)</b>
2010	857.556.526	47.001.129	5.48%
2011	1.057.703.670	111.021.474	10.50%
2012	1.191.890.450	164.360.940	13.79%
2013	1.354.198.687	156.373.178	11.55%
2014	1.533.508.352	127.289.722	8.30%

Sumber : BPS (diolah)

Rasio Keserasian dibagi menjadi Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi Gunungkidul dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Dimulai dari tahun 2010 sebesar 75,27%. Kemudian di tahun 2011 menjadi 71,49%, dan pada tahun 2012 turun menjadi 71,12%. Pada tahun 2013 kembali turun menjadi 69,20% dan di tahun 2014 sedikit mengalami kenaikan menjadi 69,22%. Penurunan rasio belanja operasi di kabupaten Gunungkidul tidak terlalu signifikan hanya sekitar 2% per tahun.

Rasio Belanja Modal di kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 rasio belanja modal sebesar 5,48% naik menjadi 10,50% di tahun 2011. Kemudian di tahun 2012 naik menjadi 13,79%. pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 11,55% dan di tahun 2014 menjadi 8,30%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Rasio Belanja Operasi masih sangat besar dibandingkan Rasio Belanja Modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah kabupaten Gunungkidul lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu, ke depannya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

r = Rasio Pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.

Hasil dari perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat di lihat di tabel di bawah ini :

**Tabel 9. Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2010-2014**

Keterangan (dalam jutaan)	Tahun					Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	
PAD	42542031	54462419	67050782	83427448	159304338	
Pertumbuhan PAD		28.02%	23.11%	24.42%	90.95%	41.63%
Pendapatan	798248875	965826233	1076501995	1242092675	1372846296	
Pertumbuhan Pendapatan		20.99%	11.46%	15.38%	10.53%	14.59%
Belanja Operasi	645496109	756172120	847695011	937133369	1061567148	
Pertumbuhan B.Operasi		17.15%	12.10%	10.55%	13.28%	13.27%
Belanja Modal	47001129	111021474	164360940	156373178	127289722	
Pertumbuhan Belanja Modal		136%	48%	-5%	-19%	40.20%

Sumber : BPS (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2010 sampai tahun 2014 di Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2010 pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar 798.248.875.000 naik menjadi 965.826.233.000 pada tahun 2011. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2012 menjadi 1.076.501.995.000. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan lagi menjadi 1.242.092.675.000 kemudian di tahun 2014 menjadi 1.372846296.000.

Jika dilihat dari perkembangan tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan secara positif. Tahun 2011 tumbuh 20,99%. Tahun 2012 sebesar 10,53%, Tahun 2013 menjadi 11,46% dan di tahun 2014 sebesar 15,38%.

Realisasi PAD Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 PAD Kabupaten Gunungkidul sebesar 42.542.031.000 atau sebesar 5,33% dari total pendapatan. Tahun 2011 naik menjadi 54.462.419.000 atau sebesar 5,64% dari total pendapatan. Tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi 67.050.782.000 atau sebesar 6,23% dari total pendapatan. Pada tahun 2013 PAD naik menjadi 83.427.448.000 atau sebesar 6,71% dari total pendapatan dan di tahun 2014 naik menjadi 159.304.338.000 atau sebesar 11,61% dari total pendapatan.

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, rata-rata dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar 41,63%. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 90,95%. diharapkan Kabupaten Gunungkidul selalu meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan berusaha tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya.

Perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2011 tumbuh 17,15% dan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 12,10%. Tahun 2013 sebesar 10,55% dan di tahun 2014 naik kembali sebesar 13,28%. sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,27%.

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal mengalami kenaikan dan penurunan cenderung fluktuatif. Di tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 136%. Hal ini merupakan pertumbuhan yang cukup signifikan. Kemudian di tahun 2012 turun menjadi 48%. Tahun 2013 pertumbuhan rasio belanja modal -5% dan di tahun 2014 menjadi -19%. Sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 40,20%.

Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal cenderung fluktuatif. Proporsi belanja modal jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Belanja Operasi. Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul seharusnya lebih mengalokasikan dananya untuk belanja modal sehingga pembangunan di daerahnya bisa lebih optimal.

### 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil dari perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat di lihat di Tabel di bawah ini :

**Tabel 10. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Gunungkidul Tahun Anggaran 2010-2014**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (dalam jutaan)	Pendapatan Transfer (dalam jutaan)	RKKD%	Pola Hubungan
2010	42.542.031	633.692367	6.71%	Instruktif
2011	54.462.419	667.004.719	8.17%	Instruktif
2012	67.050.782	799.932.048	8.38%	Instruktif
2013	83.427.448	877.414.789	9.51%	Instruktif
2014	159.304.338	923.974.088	17.24%	Instruktif

Sumber : BPS (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Berawal pada tahun 2010 Rasio Kemandirian sebesar 6,71% kemudian naik menjadi 8,17% di tahun 2011. Tahun 2013 Rasio Kemandirian sebesar 8,38 dan naik menjadi 9,51% di tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 naik lagi menjadi 17,24%. Walaupun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0%-25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah selama lima tahun pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong interval 0-25%. Rasio kemandirian

yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2010 sebesar 107%, tahun 2011 sebesar 130%, tahun 2012 sebesar 121%, tahun 2013 sebesar 125% dan tahun 2014 sebesar 176%.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah belum efisien karena selama lima tahun berturut-turut skalanya di atas 100%. Rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah selama lima tahun yaitu 109,8%. Pada tahun 2010 rasio efisiensinya sebesar 107%, kemudian tahun 2011 menjadi 110%, tahun 2012 sebesar 111%, tahun 2013 sebesar 109% dan di tahun 2014 sebesar 112%.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya. Tahun 2010, Rasio Belanja Operasinya sebesar 75,27% mengalami penurunan menjadi 71,49%, kemudian di tahun 2012 menjadi 71,12%. Tahun 2013 turun lagi menjadi 69,20% dan di tahun 2014 menjadi 69,22% sehingga rata-rata rasionya sebesar 71,26%. Pada Rasio Belanja Modal mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2010 sebesar 5,48%, naik menjadi 10,50% di tahun 2011. Tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi 13,79%. Tahun 2013 turun menjadi 11,30% dan di tahun 2014 menjadi 8,30%. Rata-rata Rasio Belanja Modal sebesar 9,92%
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 41,63% lebih bagus bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan yang sebesar 14,59%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal cenderung fluktuatif. Tahun 2011 sebesar 136% turun menjadi 48% di tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 turun menjadi -5% dan di tahun 2014 menjadi -19%. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi terjadi kenaikan dan penurunan. Tahun 2011 sebesar 17,15% turun menjadi 12,10% di tahun 2012. Tahun 2013 turun kembali menjadi 10,55% dan naik menjadi 13,28% di tahun 2014. Sehingga rata-rata pertumbuhan rasio belanja operasi sebesar 13,327%.
5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2010 Rasio Kemandirian sebesar 6,71% kemudian naik menjadi 8,17% di tahun 2011. Tahun 2012 naik menjadi 8,38% dan kembali naik di tahun 2013 menjadi 9,51% dan 17,24% di tahun 2014. Walaupun rasio kemandirian keuangan naik tetapi pola hubungannya masih berkisar antara 0%-25% yaitu pola hubungan instruktif.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk

mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah, Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta pemanfaatan aset –aset daerah yang potensial. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan berbagai macam rasio yang bisa menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan memperluas lingkup wilayah penelitian dan jangka waktu penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mohammad Mahsun (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE
- Puput Risky Pramita (2015). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013
- Hony Adhiantoko (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2009-2010. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik
- Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2010-2011. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik
- Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2011-2012. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik
- Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2012-2013. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik
- Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2013-2014. Yogyakarta : Badan Pusat Statistik
- Faahakhododo Waruwu. (2009) .Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonom Daerah Di Kabupaten Nias Tahun 2001-2007. Tesis S-2, PPS UGM (tidak dipublikasikan).
- Nahmiati, Erny. (2008). Analisis Kebijakan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Bima). Tesis S-2, PPS UGM (tidak dipublikasikan).
- Dwiranda, Aan. (2007). Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Bali. Universitas Udayana, Bali
- Hermi Oppier. (2013). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Benchmark Volume 2 November 2013.